



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM EVALUATOR INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN DAFTAR NARAHUBUNG UNIT ORGANISASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menyusun Tim Evaluator Internal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Evaluator Internal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EVALUATOR INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN DAFTAR NARAHUBUNG UNIT ORGANISASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Daftar Narahubung Unit Organisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Daftar Narahubung Unit Organisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I-II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Susunan Keanggotaan Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Lampiran II : Daftar Narahubung Unit Organisasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Arif Rachman



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM EVALUATOR INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN DAFTAR
NARAHUBUNG UNIT ORGANISASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 81 TAHUN 2025

TANGGAL : 5 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUATOR INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Pengarah	:	Hendrar Prihadi
2.	Penanggung Jawab	:	Hendro Kuswanto
3.	Pengendali Teknis	:	Himawan Aditya Perdana
4.	Ketua Tim	:	1. Muhamad Yusuf Chandra 2. Rinaldy Prihandoko
5.	Anggota	:	1. Ghina Rosyda 2. Muhammad Musyawir Marsaoly 3. Muhammad Hilmy

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM EVALUATOR INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN DAFTAR
NARAHUBUNG UNIT ORGANISASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 81 TAHUN 2025

TANGGAL : 5 Juni 2025

DAFTAR NARAHUBUNG UNIT ORGANISASI ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	:	1. Ermawanto 2. Hima Tussafinah 3. Sofie Maghfira
2.	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	:	1. Agung Ismail 2. Eko Nirwanto Putro Hanardi 3. Made Widhiantika
3.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	:	1. M. Andhika Rangga Lazuardi 2. Rezang Patuh Romad

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
4.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	:	1. Putri Ayu Permatasari 2. Fairuz Nawfal Hamid 3. Fadliyadi Jezria 4. Dipo Adi Negoro 5. Moch. Ilham Riswanda 6. Putri Triyandini
5.	Sekretariat Utama	:	1. Kemala De Kristie 2. Dahat Riswanto 3. Dedi Machfudin
6.	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	:	1. Rizky Dwi Raharjo 2. Wahyu Eko Saputro 3. Risang Priyo Wijoyo
7.	Pusat Data dan Informasi	:	1. Ardian Hoppin Sitompul 2. Citra Yulian Kristanti
8.	Inspektorat	:	1. Muhammad Zainuddin 2. Rydo Tama

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI